

TPID Kota Bogor Buru Pedagang Beras SPHP yang tak Jujur

BOGOR (IM)- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menggelar monitoring evaluasi (money) Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Beras di tingkat konsumen melalui distributor.

Hasilnya TPID akan sering turun ke pasar tradisional memburu pedagang beras SPHP yang mengoplos dengan beras lain.

"Iya kami terus melakukan sidak beras SPHP di Kota Bogor. Beras Bulog ini kan tujuannya untuk menekan inflasi, tapi di beberapa wilayah lain atau kota lain ditemukan ada pedagang yang tidak jujur dengan mencampurkan beras SPHP atau dioplos dengan beras lain dan dijual dengan harga lebih mahal," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dalam keterangan tertulis pada Rabu (8/11).

Syarifah memaparkan, tim yang turun untuk sidak ke Pasar Bogor dan Pasar Anyar yakni dari Bulog, Bapanas, DKPP Provinsi, Kemendagri dan TPID Kota Bogor. Tim mengecek ketersediaan beras SPHP, apakah cukup atau tidak untuk masyarakat. "Ke-

muudian mengecek kualitas beras SPHP jangan sampai di oplos dan apakah harganya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," paparnya.

"Bulog dan Bapanas berkewajiban untuk melakukan sidak. Mudah-mudahan hasil sidak di Kota Bogor tidak ada pedagang nakal. Kalau nanti ada temuan baru berkoordinasi dengan polisi. Kalau sekarang baru pemantau saja," tegas Syarifah.

Sementara itu, Kepala Dinkum Dagin Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan, berdasarkan info terakhir dropping beras SPHP untuk agen sempat dikurangi karena harganya tinggi. Sehingga Bulog membuat kebijakan dengan langsung mendistribusikan ke pengecer di pasar.

Informasi terbaru sudah mulai dibuka lagi untuk agen. Kami akan konsisten mengecek ke lapangan distribusi beras SPHP masih cukup atau tidak, apakah sudah sesuai menjual beras SPHP-nya baik dari segi kualitas dan harga dari HET-nya yakni 5 kg Rp 54.500," pungkasnya. ●jay

DLH : TPA Cibereum Masih Dalam Penjajakan Intensif

BANDUNG (IM)- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung menyebut, rencana pemanfaatan tempat pembuangan akhir (TPA) Cibereum, Kabupaten Sumedang masih dalam tahap penjajakan intensif.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruq mengatakan, masih perlu adanya pembicaraan lebih lanjut sebelum Pemerintah Kota (Pemkot) menggunakan TPA Cibereum.

"Ada hal-hal teknis yang harus dibicarakan. Contoh seperti besaran tipping fee. Kemudian soal kompensasi dampak negatif kepada warga disana. Dan terakhir harus ada perjanjian kerjasama antara Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang," kata Salman Faruq, Rabu (8/11).

Pemkot Bandung, dituturnya lebih condong untuk memanfaatkan lahan TPA

Cibereum. Sebabnya, TPA Cibereum saat ini telah menjadi lokasi pembuangan sampah bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Beda halnya dengan TPA Cijeruk. Meski secara fasilitas dan infrastruktur telah memadai, namun akses jalan menuju TPA Cijeruk belum siap untuk dilalui kendaraan-kendaraan besar.

"Karena alasan-alasan ini, masih ada penolakan dari masyarakat di sana. Akses jalan belum memadai. Maka yang coba kita dorong adalah TPA Cibereum, dan sudah beroperasi dijadikan TPA. Kita akan coba menjajaki dengan menginformasikan yang sudah bertumpuk di TPS," ucapnya.

Salman berharap, kedua pemerintah daerah dapat menemui kesepakatan dalam hal ini. Karena hingga sampai sekarang, Pemkot Bandung belum memiliki alternatif lain untuk lokasi pembuangan sampah. ●pra

DPRD Kabupaten Bogor Bahas Penguatan Pesantren dan Usulan Pj. Bupati



Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, se usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

BOGOR (IM)- DPRD Kabupaten Bogor, Selasa malam (7/11) Rapat Paripurna membahas rencana penguatan pesantren, berda Palestina, dan menetapkan usulan tiga nama calon penjabat (Pj) Bupati Bogor ke Kemendagri menggantikan Iwan Setiawan yang masa jabatannya berakhir Desember nanti.

Salah satu yang diusulkan adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Juanda Dimansyah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) untuk calon Penjabat (Pj) Bupati Bogor. Dua nama lainnya yakni Dr Nurdin (Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Kerja sama pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri).

Sebelumnya DPRD telah menjangkir nama calon penjabat Bupati Bogor menggantikan Iwan Setiawan. Terdapat 10 usulan nama calon Penjabat Bupati. Dari 10 nama tersebut, DPRD Kabupaten Bogor menyepakati mengusulkan tiga nama.

"Ke-10 nama itu, DPRD Kabupaten Bogor kemudian

melalui mekanisme tahapan-tahapan yang sudah ditempuh bersama dengan pimpinan Kabupaten Bogor, akhirnya mengusulkan 3 nama calon Penjabat Kabupaten Bogor," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto kepada wartawan.

Dijelaskan lebih lanjut, usulan calon Pj tersebut didapat dari rekomendasi kelompok masyarakat dan fraksi DPRD. "DPRD Kabupaten menerima usulan dan rekomendasi dari beberapa kelompok masyarakat dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bogor.

Berikut 10 nama calon Pj Bupati Bogor yang diusulkan, di antaranya: Engkus Sutisna (Staff Ahli Gubernur Jawa Barat bidang hukum pemerintah dan politik), 2. Zaenudin MA (Ketua PCNU Kabupaten Bogor), 3. AKBP Iman Imanudin (Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya), 4. Adang Suptandar (Auditor Ahli Utama Inspektorat Kabupaten Bogor), 5. Juanda Dimansyah (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor), 6. Nurdin (Direktur Generasi Perbantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri), 7. Tubagus Hairul Dwi (Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adab Desa PKK dan Posyandu pada Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri), 8. Soebiantoro (Kepala Dinas PUPR),

9. Risnandar Mandiwa SSTP (PLH Seksi Direjen Politik dan TUN Direktur Kemasyarakatan, dan

10. Yeti Rahmat (Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kementerian Dalam Negeri). ●gio

8 | Nusantara



PEMBANGUNAN REAKTIVASI STASIUN PONDOK RAJEG

KRL tujuan Nambo-Jakarta Kota melintas di Stasiun Pondok Rajeg yang sedang dibangun, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/11). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan reaktivasi stasiun Pondok Rajeg bertujuan meningkatkan pengguna moda transportasi umum dan keterjangkauan pelayanan angkutan umum atau coverage area.

DPRD BOGOR SAHKAN RAPERDA PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bupati Bogor: Komitmen Majukan Pendidikan Islam

Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, Perda ini merupakan bentuk penghargaan kepada pondok pesantren dan para santri serta komitmen Pemkab Bogor memajukan Pendidikan Islam di Kabupaten Bogor terdapat lebih dari 1.600 pondok pesantren yang telah melahirkan generasi islami di berbagai bidang.

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mensahkan Raperda Penyelenggaraan Pesantren menjadi Perda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada Selasa (7/11).

Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, Perda ini merupakan bentuk penghargaan kepada pondok pesantren dan para santri serta komitmen Pemkab Bogor memajukan Pendidikan Islam.

Menurut Iwan, saat ini di Kabupaten Bogor terdapat lebih dari 1.600 pondok pesantren yang telah melahirkan generasi islami di berbagai bidang.

Di era saat ini, selain berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia juga menjadi benteng terakhir pertahanan moralitas generasi muda di era global.

Untuk itu, alumni Ponpes Nurul Haq Cisarua ini menilai Perda Penyelenggaraan Pesantren ini menjadi sebuah keharusan karena penting untuk melindungi keberadaan pesantren.

Dengan perda ini, Pemkab Bogor memiliki payung hu-

kum untuk lebih meningkatkan fasilitas terhadap lembaga pendidikan pesantren. Dengan begitu, diharapkan ada peningkatan kualitas pondok pesantren, baik dari sisi penyelenggaraan maupun sarana dan prasarana.

"Tentu ini juga bentuk penghargaan kami karena dari pesantren lahir para pejuang yang mampu memberikan kontribusi besar. Perda ini juga memperkuat legalitas dan eksistensi pendidikan pesantren di masyarakat dalam konteks pendidikan keagamaan," kata Iwan, Rabu (8/11).

Iwan Setiawan juga berharap disetujuinya raperda pesantren yang mengatur terkait fasilitas, komunikasi,

kemitraan, data informasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pembinaan dan pendanaan, diharapkan dapat mendukung pesantren di Kabupaten Bogor agar semakin maju dan berkembang sesuai tradisi dan kekhasannya.

"Sehingga akan meningkatkan kontribusinya pada terwujudnya karsa Bogor Cerdas dan Karsa Bogor berkeadilan. Atas nama Pemkab Bogor, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD yang telah membahas intensif Raperda Penyelenggaraan Pesantren ini sehingga dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," pungkasnya. ●gio

Bupati Bogor Pastikan Tumpukan Sampah di Ciawi akan Ditangani

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Iwan Setiawan memastikan tumpukan sampah di simpang Ciawi segera ditangani dan dilakukan pencegahan agar tidak terulang. Hal ini dia tegaskan saat memantau langsung pembersihan tumpukan sampah di simpang Ciawi, Selasa (7/11).

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bogor) bersama pihak TNI akan melakukan pembersihan terhadap tumpukan sampah tersebut. Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Kav. Gan Gan Rusgandara turut memantau langsung pembersihan tumpukan sampah tersebut.

Mendampingi Bupati Bogor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Inspektur Kabupaten Bogor, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Camat Ciawi.

Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, dirinya hadir langsung untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait adanya tumpukan sampah di simpang Ciawi. Intinya hari ini kami mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi persoalan tumpukan sampah ini agar tidak terulang.

Hari ini kita mulai membersihkan dan berupaya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Saya minta bangunan liar yang ada di lokasi ini dibongkar, agar proses pengerukan sampah bisa berjalan dengan lancar. Saya minta camat untuk mengawasi, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali," tandas Iwan Setiawan.

Iwan mengungkapkan, hari ini kita berbagi tugas, dan yang akan dilibatkan nantinya ada dari unsur TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Jasa Marga.

"Namun saya meminta agar pembongkaran bangunan liar dilakukan dengan pendekatan humanis. Saya berharap lokasi ini ke depan bisa dibuat nyaman, misalnya seperti dibuat taman," ungkap Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin menerangkan, lokasi ini adalah lahan milik Kementerian PUPR yang dikelola oleh PT. Jasa Marga, yang tentunya ke depan akan dikelola lebih baik lagi. Ke depan akan dibangun gorong-gorong untuk saluran airnya agar lebih rapi dan tidak terjadi lagi penumpukan sampah yang menyebabkan tersumbatnya aliran air.

"Saya meminta Bupati Bogor dan Danrem untuk segera membersihkan tumpukan sampah ini, sehingga masyarakat bisa tetap nyaman. Hari ini kami gerak cepat kita berbagi tugas, untuk pembersihan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bersama TNI. Sampah akan dibuang ke TPA Galuga," terang Bey. ●gio



Pemkab Bogor segera bersihkan tumpukan sampah simpang Ciawi, Puncak, Kabupaten Bogor.

Masuk Musim Pancaroba, BPBD Jabar Siapkan Mitigasi Bencana Alam

BANDUNG (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan pelbagai cara untuk menghadapi bencana alam akibat musim pancaroba. Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Dani Ramdan yang ditemui usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Dom Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/11).

Mitigasi kebencanaan, kata Dani Ramdan, masih menjadi formula untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Saat ini, BPBD Jabar telah mewadahi relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk menyosialisasikan mitigasi kebencanaan.

"Misalnya di lingkungan rumah masing-masing, membersihkan saluran-saluran air sampai kali di sungai, sosialisasi itu kita sampaikan menggunakan relawan atau langsung dari BPBD," kata Dani Ramdan.

Pengurangan potensi bencana di sektor sungai, BPBD Jabar bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Kerjasama dengan BBWS, kata dia, mulai dari susur sungai, hingga mendeteksi potensi banjir bandang serta pohon tumbang.

"Kita kerjasama dengan BBWS melakukan susur sungai. Terutama yang punya potensi banjir bandang."

"Jadi daerah hulu, supaya tidak ada pohon yang tumbang, batu atau material lain yang biasanya pada saat musim hujan menjadi pemicu adanya banjir bandang," kata dia.

Dani Ramdan lantas menyebut beberapa wilayah di Jabar yang berpotensi mengalami bencana banjir, yakni di wilayah Pantura, Bekasi, Subang, Karawang, hingga Indramayu. "Kalau longsor di selatan, mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan. Kalau Pangandaran, Ciamis banjir," imbuh Dani Ramdan.

Dani Ramdan menyebut, musim pancaroba juga berpotensi terjadi angin kencang. Meski, soal potensi angin kencang tidak ada dalam mitigasi kebencanaan, namun tetap disiapkan antisipasi. "Karena angin kencang itu, mitigasinya harus memperbanyak penanaman pohon besar. Itu bisa mengurangi sirkulasi angin."

"Nanti yang harus kita siapkan reaksi cepat. Reaksi cepat itu, misalnya

pohon tumbang menghalangi jalan, minimal atau kalau sudahimpa korban ada upaya penyelamatan," ungkap Dani Ramdan. Selain mengimbau soal reaksi cepat, Dani Ramdan menyebut mitigasi bencana angin kencang itu harus memperkuat bangunan, terutama atap. "Biasanya transisi dari kemarau ke hujan, ada cuaca ekstrem, angin puting beluung," kata dia. ●pra